

BAB IV

ALASAN KEPUTUSAN SWISS BERGABUNG DALAM *PARTNERSHIP FOR PEACE (PFP)* PADA TAHUN 1996

Telah dibahas sebelumnya mengenai sejarah Swiss, netralitas Swiss, *North Atlantic Treaty Organization's Partnership for Peace* (NATO's PFP), serta pada saat Swiss bergabung dalam NATO's PFP, maka dalam bab ini akan dibahas mengenai alasan Swiss untuk bergabung dalam NATO's PFP.

Setelah perang dingin, maka isu-isu tradisional seperti ideologi dan perang sudah mulai ditinggalkan terutama di Eropa. Isu tradisional tersebut tergantikan oleh isu-isu yang lebih kompleks, dimana melibatkan aktor non negara. Di sisi lain, isu baru tersebut dapat memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap Swiss yang merupakan negara *landlocked* dan berbatasan dengan negara-negara besar yang telah melakukan kerjasama internasional dengan EU, NATO, dan sebagainya. Dalam *Report on Neutrality 1993*, telah dijelaskan bahwa netralitas sendiri tidak dapat melindungi negara Swiss dari masalah-masalah baru seperti terorisme, kejahatan terorganisir dan kerusakan lingkungan.¹

Menyadari bahwa isu-isu ini dapat mengancam keamanan dan kedaulatan negaranya, maka pemerintah Swiss mengambil keputusan untuk memperluas kerjasama internasional, terutama kerjasama bersama Eropa. Hal ini sesuai dengan laporan *Swiss Foreign Policy of 29 November 1993* yang menyatakan,

¹ "*Swiss Security Policy*", diakses dari <http://www.globalsecurity.org/military/world/europe/ch-policy.htm>, pada tanggal 26 Januari 2016.

“Since the end of the Cold War the Federal Council has consistently extended its international commitments and cooperation in international security.”²

Salah satu langkah besar yang diambil oleh Swiss pada saat itu adalah dengan bergabung dalam PfP pada akhir tahun 1996. Langkah tersebut menggarisbawahi upaya pencegahan dari pemerintah Swiss untuk meningkatkan hubungan mereka dengan dunia luar. Ketika ditanya mengenai keputusan pemerintah terkait bergabungnya Swiss dalam PfP, Menteri Pertahanan Adolf Ogi mengatakan,

“Switzerland does not want to stay on the sidelines.”³

Selanjutnya terkait PfP yang merupakan program dari NATO, beliau kembali menjelaskan bahwa,

“We do not want to become a member of NATO, but we want to take part in Partnership for Peace because we think it is important that we show Europe and the world that we can contribute something as a country of four different cultures, four different languages and 26 states.”⁴

Pasca bergabungnya Swiss dalam PfP, PfP telah memberikan beberapa solusi kepada Swiss terkait isu-isu baru yang mengancam keamanan dan kedaulatan negaranya.

² Swiss Neutrality in Practice – Current Aspects: Report of the interdepartmental working group of 30 August 2000, hlm. 3.

³ “Swiss Start to Emerge From Well-Armed Cocoon”, diakses dari <http://www.deseretnews.com/article/518982/SWISS-START-TO-EMERGE-FROM-WELL-ARMED-COCOON.html?pg=all&nm=1>, pada tanggal 1 Oktober.

⁴ *Ibid.*

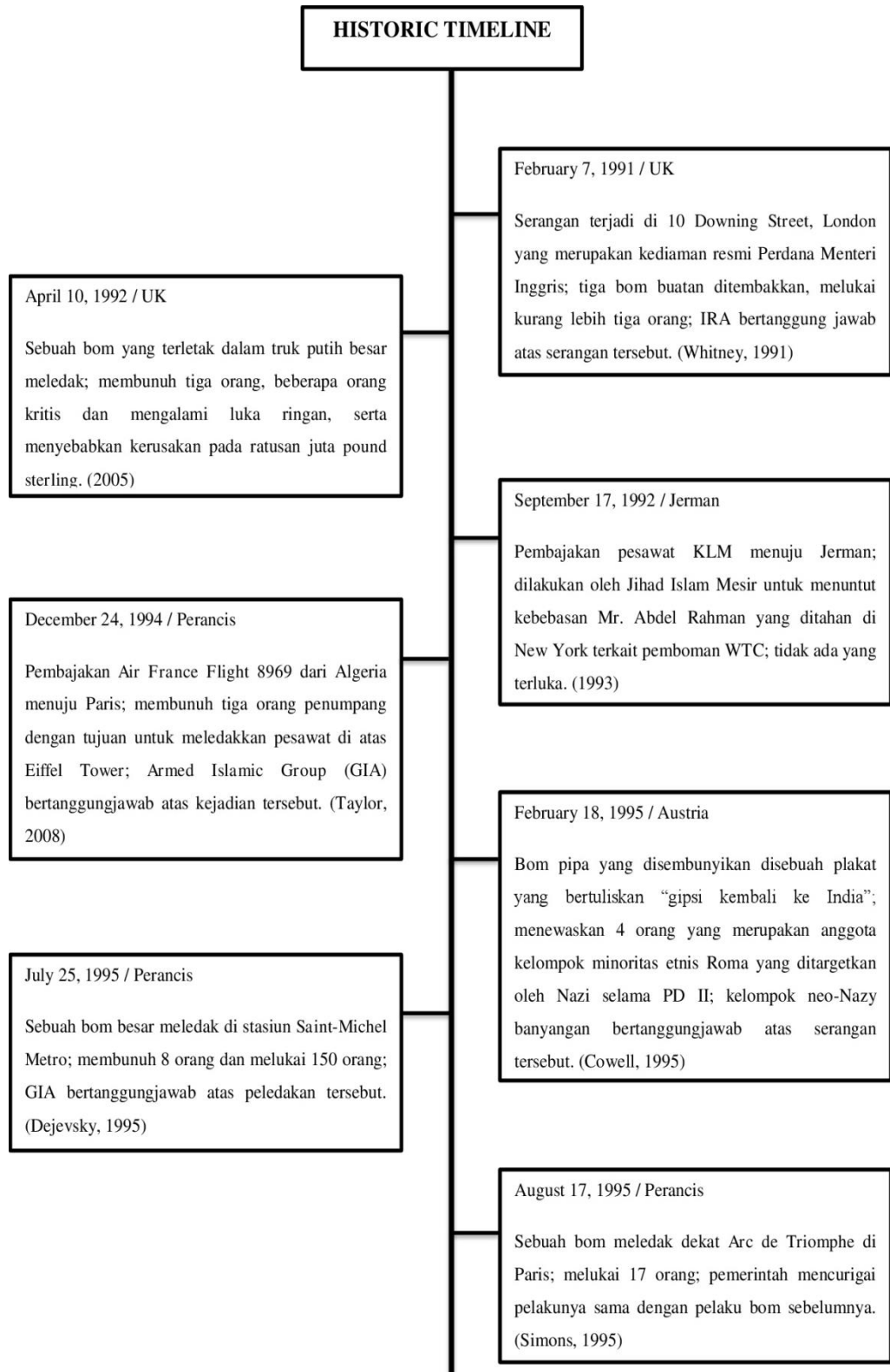
A. Terorisme

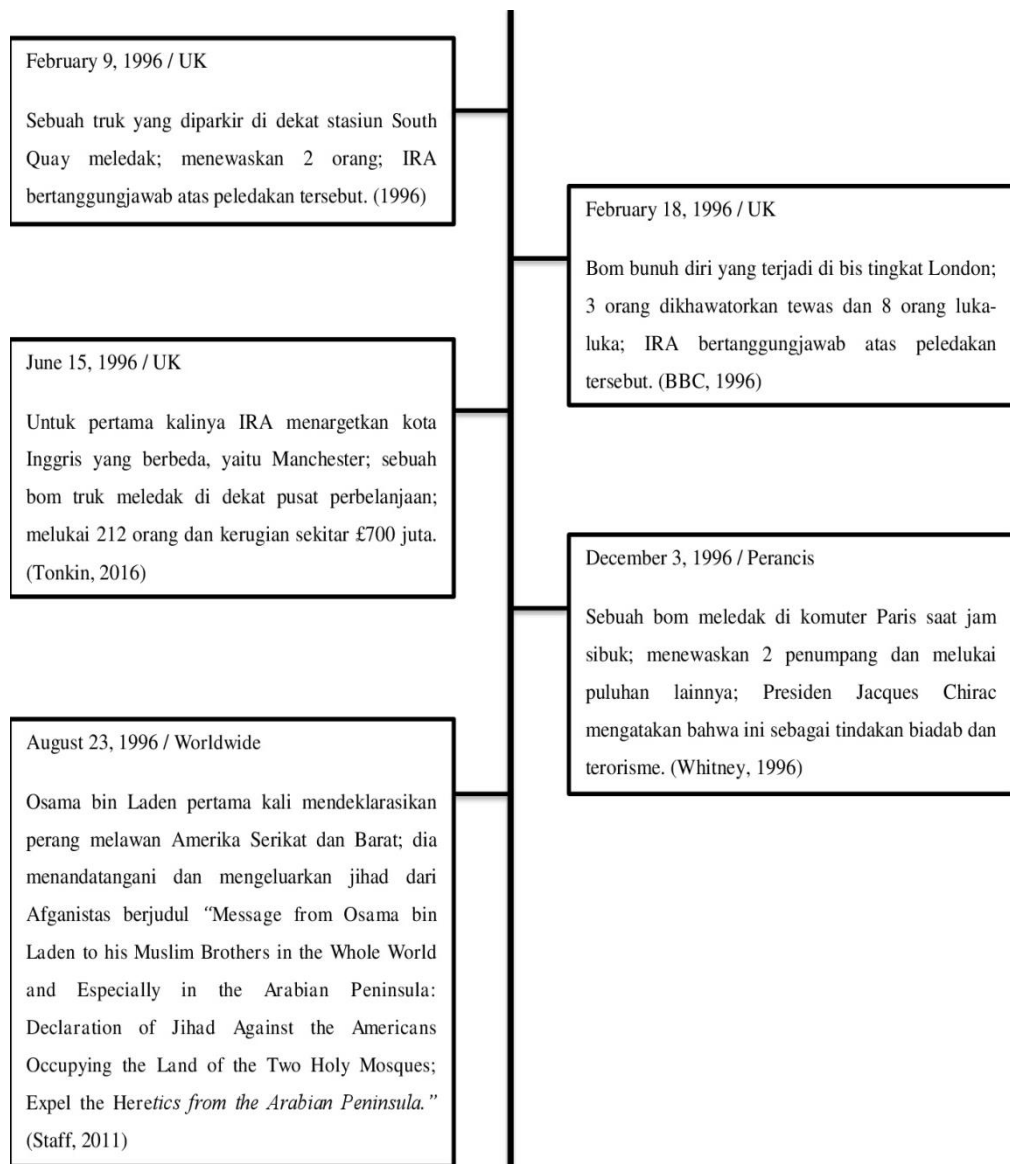
1. Permasalahan

Terorisme sebagai kejahatan lintas batas negara terus menimbulkan ancaman bagi keamanan internal dan eksternal negara-negara di dunia. Hal ini tidak terlepas dari kawasan Eropa, termasuk Swiss. Mengingat bahwa Swiss sering dijadikan sebagai *headquarter* oleh negara-negara lain, seperti kedutaan besar dan kantor pusat organisasi internasional, yang dikhawatirkan dapat menarik perhatian para teroris.⁵ Meskipun Swiss masih belum menjadi target utama terorisme, tidak menutup kemungkinan bahwa serangan teroris dapat terjadi di Swiss kapan saja. Apalagi melihat letak geografis Swiss yang berada diantara negara-negara besar, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi keamanan Swiss secara langsung maupun tidak. Paska perang dingin muncul berbagai aksi terorisme yang terjadi, entah itu berupa ancaman atau serangan. Berikut adalah beberapa aksi terorisme yang terjadi di kawasan Eropa, diantaranya;

⁵ “*Security through Cooperation: Report of the Federal Council to the Federal Assembly on the Security Policy of Switzerland*”, June 1999, hlm. 15.

Bagan 4.1 Kronologi serangan terorisme di Eropa





Serangkaian kejadian yang terjadi tersebut memang tidak memberikan dampak secara langsung kepada Swiss, akan tetapi dikhawatirkan dapat memberikan dampak tidak langsung berupa munculnya pengaruh gerakan ekstrimis dalam Swiss yang dapat mengancam stabilitas keamanan dalam negeri.⁶

⁶ *Ibid.* hlm. 16.

Selain itu, standar keamanan yang tinggi dalam hal kerahasiaan data yang terdapat pada bank di Swiss juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para teroris, karena akan mempersulit pihak berwenang untuk melacak sumber-sumber dana yang akan digunakan untuk mendukung aktivitas terorisme. Sehingga mengakibatkan Swiss masuk dalam kategori negara yang terancam.⁷

Dengan adanya ancaman ini, Swiss menyadari bahwa mereka perlu untuk melakukan tindakan pencegahan, yaitu salah satunya dengan mencegah Swiss menjadi tempat dukungan kelompok teroris, penyimpanan dana, atau persinggahan.⁸ Akan tetapi hal tersebut akan sulit untuk dicapai mengingat bahwa Swiss kekurangan teknologi dibidang pelacakan, serta tidak berpartisipasi dalam kerjasama keamanan Uni Eropa dan organisasi lainnya.

2. Solusi yang ditawarkan *Partnership for Peace* (PfP)

Terorisme sebagai sebuah kejahatan lintas batas telah mengancam perdamaian dunia dan keamanan internasional, termasuk perdamaian dan keamanan Swiss. Hal ini membuat Swiss segera mengambil tindakan untuk melindungi diri dan kepentingannya dari terorisme, dengan cara berkomitmen untuk melawan terorisme. Bergabungnya Swiss dalam PfP adalah salah satu strategi Swiss untuk melawan terorisme, karena Swiss

⁷ *Ibid.*

⁸ The Centre for International Security Policy (CISP), *Switzerland's Foreign Policy and the Partnership for Peace*, 2004.

berpendapat bahwa terorisme tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan harus dilakukan bersama-sama dalam kerjasama dengan negara lain.⁹

Mencegah Swiss sebagai tempat dukungan kelompok teroris dan penyimpanan pendaan adalah salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh Swiss dalam mencegah dan melawan terorisme.¹⁰ Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Swiss memerlukan sebuah alat yang ideal untuk mengatasi masalah pendanaan terorisme, dan PfP adalah alat tersebut. PfP merupakan salah satu program kerjasama internasional dimana wakil-wakil dari 46 negara di kawasan Eropa, seperti para ahli dari kementerian yang bersangkutan, termasuk peradilan dan kepolisian berwenang, dan komunitas intelijen bertemu.¹¹ PfP juga telah mengadopsi rencana aksi bersama dan komitmen untuk melakukan kerjasama yang lebih erat dalam memerangi terorisme dengan cara memberikan bantuan dalam kasus-kasus tersebut. Sehingga hal tersebut dapat menjadi solusi yang sangat diperlukan oleh Swiss, karena dapat meningkatkan jaringan kerjasama internasional, termasuk antara negara dan sektor swasta.¹² Selain itu, Swiss juga dapat melakukan diskusi dan dialog dengan negara-negara mitra mengenai terorisme, seperti yang dilakukan pada tahun 2003 yaitu diskusi “*Financing of Terrorism*” dan pada tahun 2005 “*EAPC Conference on*

⁹ The Federal Council, *Counterterrorism Strategy for Switzerland*, 2015, hlm. 2.

¹⁰ The Centre for International Security Policy (CISP), *op. cit.*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

Terrorism".¹³ Adapun dialog dan diskusi yang dilakukan melalui GCSP yaitu:

- a. Diskusi publik "*Making Sense of ISIS – The Islamic State and Changing Geostrategic Dynamics*", pada tanggal 30 September 2014;
- b. Diskusi publik "*Crisis in the Fertile Crescent*", pada tanggal 8 Desember 2014;
- c. Diskusi publik "*The Role of Women and Girl in Countering Violent Extremism*", pada tanggal 13 Februari 2015;
- d. Diskusi publik "*After Paris; \: The Challenge of Returning Fighters*", pada tanggal 17 Februari 2015;
- e. Konferensi "*Le Moment Terroriste: Anciennes Menaces, Nouveaux Enjeux et Mutations*", ppada tanggal 27 Mei 2015;
- f. Diskusi publik "*Looking Over the Horizen*", pada tanggal 15 Juni 2015;
- g. Diskusi publik "*The Many Dimensions of Counterterrorism*", pada tanggal 3 November 2015;
- h. Dialog "*Preventing and Countering Violent Extremism: National Experiences and Best Practices*", pada tanggal 3 Desember 2015;
- i. "*Is there a soulution in Syria with Assad?*", pada tanggal 16 Desember 2015;

¹³ Individual Partnership Programme between Switzerland and NATO for 2005, December 2004.

j. “*Global Terrorism: Current Trends*”, pada tanggal 2 Maret 2016;

k. “*Preventing Violent Extremism: Issues and Challenges*”, pada tanggal 24 Mei 2016;

Kemudian untuk semakin memperkuat pemberantasan terorisme, Swiss sangat tertarik untuk berpartisipasi dalam *Partnership Action Plan against Terrorism* (PAP-T), hal ini dapat dilihat dalam pernyataan Swiss di Madrid, Spanyol pada tanggal 4 Juni 2003, yang berisi bahwa,

*“Switzerland is fully committed to implementing the Action Plan against Terrorism. Switzerland welcomes the broad approach underlying the Action Plan, focusing on prevention, repression as well as on disaster relief. Switzerland has been deploying for several years many efforts to effectively protect its financial center from criminal activities. Swiss legislation to combat terrorism explicitly orders the blocking of funds used for the financing of terrorism. Banking secrecy is no obstacle to fighting terrorism, nor any other crime.”*¹⁴

PAP-T mengarisbawahi pentingnya melindungi kebebasan dasar dan hak asasi manusia, serta menegakkan supremasi hukum dalam memerangi terorisme. Rencana aksi ini dimaksudkan untuk lebih memfasilitasi *intelligence-sharing* dan kerjasama di berbagai bidang seperti keamanan perbatasan, pelatihan terkait terorisme, pengembangan kemampuan untuk pertahanan terhadap serangan teroris dan untuk mengelola konsekuensi dari serangan seperti itu.

¹⁴ Statement by State Secretary Franz von Däniken, Swiss Federal Department of Foreign Affairs, Madrid, Spain, June 2003, diakses dari <http://www.nato.int/docu/speech/2003/s030604p.htm>, pada tanggal 27 November 2016.

B. Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

1. Permasalahan

Sebelum menjadi negara yang mendukung penuh pelucutan senjata pemusnah massal, pada tahun 1960-an terjadi perdebatan terkait senjata nuklir di Swiss sebagai reaksi terhadap persenjataan nuklir Amerika Serikat dan Uni Soviet.¹⁵ Sebuah diskusi panas dimulai ketika parlemen mempertanyakan apakah tentara harus dilengkapi dengan senjata nuklir untuk melindungi netralitas dan kedaulatan Swiss.¹⁶ Akan tetapi, pada tahun 1962, warga Swiss menolak tawaran tersebut dan ide-ide mengenai program senjata nuklir harus ditinggalkan. Kejadian ini kemudian membuat Swiss menandatangani perjanjian non-proliferasi nuklir pada tahun 1969, setahun setelah perjanjian tersebut dibuat. Selanjutnya, perjanjian tersebut tidak membuat pelucutan senjata nuklir langsung menjadi nyata. Sebaliknya, Amerika Serikat dan Uni Soviet semakin bersaing dalam mengungguli satu sama lain dibidang senjata nuklir, sehingga ketegangan di antara dua blok tersebut meningkat yang menyebabkan Swiss melakukan percepatan pada laporan *security policy* 1979. Laporan tersebut menyimpulkan bahwa senjata nuklir secara politik lebih diutamakan dan tetap menjadi ancaman serius bagi dunia, terutama keamanan Swiss.¹⁷

¹⁵ Gina Menghini, "Nuclear Disarmament: Switzerland's Policy Turn", diakses dari <http://isnblog.ethz.ch/security/nuclear-disarmament-switzerlands-policy-turn>, pada tanggal 1 Oktober 2016.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

Setelah berakhirnya Perang Dingin, pemerintah Swiss kembali mengeluarkan laporan baru pada tahun 1990, dimana kebijakan keamanan diperluas hingga mencakup keamanan Eropa.¹⁸ Pemerintah menyadari bahwa keamanan Swiss sangat tergantung pada keamanan Eropa, sehingga sudut pandang pun bergeser dari membangun pertahanan menjadi memperkuat kepercayaan dan kerjasama. Hal ini dikarenakan ancaman perang nuklir global relatif jarang dibicarakan, namun pergeseran ini tidak membuat proliferasi senjata nuklir menjadi berhenti, melainkan terus berlanjut dan mengakibatkan meningkatnya ancaman konflik nuklir regional.¹⁹ Selain itu, semakin banyak negara yang mengembangkan kemampuan menggunakan teknologi senjata *biological* untuk tujuan militer, yang kemudian menyebabkan pengembangan rudal balistik jarak jauh sebagai sistem pengiriman terus meningkat.²⁰ Kerjasama dan transfer teknologi kemudian telah mengarah pada pengembangan industri rudal di beberapa negara.

Ada 9 negara yang memiliki senjata nuklir, yaitu Rusia, Amerika Serikat, Perancis, Cina, Inggris, Pakistan, India, Israel dan Korea Utara.²¹ Diantara kesembilan negara tersebut, hanya 5 negara yang menandatangani *Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons* (NPT)²², yaitu

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ “*Security through Cooperation: Report of the Federal Council to the Federal Assembly on the Security Policy of Switzerland*”, *op. cit.*, hlm. 10.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Howard Steven Friedman, “*9 Countries In the Nuclear Weapons Club*”, diakses dari http://www.huffingtonpost.com/howard-steven-friedman/countries-with-nuclear-weapons_b_1189632.html, pada tanggal 27 November 2016.

²² NPT adalah perjanjian internasional yang bertujuan untuk mencegah penyebaran senjata nuklir dan teknologi senjata, untuk mempromosikan kerjasama dalam penggunaan energy nuklir secara

Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Perancis, dan Cina. Sementara 3 negara, yaitu India, Pakistan, Korea Utara belum menandatangani perjanjian tersebut, sedangkan Israel belum memberitahukan terkait kekuatan nuklir yang dimilikinya. Meskipun dengan adanya NPT, tidak semata-mata membuat ancaman nuklir menjadi berkurang, karena pada kenyataannya negara yang menandatangani perjanjian tersebut dapat melakukan pelanggaran, contohnya adalah Iran yang sepanjang tahun 1990-an diklaim oleh Amerika Serikat telah mempertahankan program aktif untuk pengembangan dan produksi senjata kimia.²³

Terkait dengan program senjata pemusnah massal dan sistem pengirimannya dan teknologi proliferasi, Swiss tetap berfokus pada Iran dan Korea Utara.²⁴ Pengembangan yang berkaitan dengan program nuklir Iran membuat khawatir karena kemungkinan digunakan untuk tujuan militer dan begitupun dengan Korea Utara yang ditakutkan dapat bereaksi kapan saja dengan senjata pemusnah massal yang dimilikinya.²⁵ Kemungkinan jatuhnya proliferasi nuklir pada aktor non-negara seperti teroris pun ditakutkan terjadi, karena telah berkurangnya kontrol atas senjata atau teknologi ini. Selain itu, larangan percobaan nuklir juga masih belum dilaksanakan, karena tidak cukup negara yang meratifikasi, termasuk Amerika Serikat.

damai dan untuk mencapai tujuan pelucutan senjata nuklir dan pelucutan senjata secara umum dan tuntas.

²³ NTI Building a Safer World, *IRAN*, diakses dari <http://www.nti.org/learn/countries/iran/>, pada tanggal 27 November 2016.

²⁴ Switzerland's Security: Situation Report 2014 of the Federal Intelligence Service FIS, hlm. 58.

²⁵ *Ibid.*

Dengan adanya ancaman ini Swiss hanya dapat melindungi diri melalui upaya perlindungan pasif. Langkah perlindungan aktif hanya mungkin dilakukan dengan kerjasama dan bantuan internasional karena keterbatasan Swiss dalam bidang teknologi dan keuangan.²⁶ Selain itu juga dapat berlaku khususnya untuk pertahanan terhadap ancaman teroris dengan senjata pemusnah massal.

2. Solusi yang ditawarkan *Partnership for Peace (PfP)*

Bergabungnya Swiss dalam PfP adalah salah satu bentuk kerjasama internasional yang dilakukan oleh Swiss untuk menghadapi isu proliferasi senjata pemusnah massal. Karena pertama, PfP meminimalisir kelemahan dalam negeri Swiss dan memastikan pertahanan terbaik melalui sejumlah fasilitas pelatihan militer yang tersedia, termasuk *Centre for Information and Communication of the Armed Force* di Berne, *Mountain Trainin Centre of the Swiss Armed Force* di Andermatt, *Tactical Training Centre at the Swiss Officers' Training Centre* di Lucerne dan *International Training Centre of the Swiss Army (SWISSINT)* di Stans.

Kedua, PfP memberikan Swiss wadah untuk dapat mempromosikan non-proliferasi senjata nuklir dengan negara anggota NATO melalui dialog, diskusi, dan pertukaran informasi. Hal ini dapat dilihat dalam program kerjasama individual antara Swiss dan NATO, dimana pada tahun

²⁶ "Security through Cooperation: Report of the Federal Council to the Federal Assembly on the Security Policy of Switzerland", *loc. cit.*

2005 Swiss menawarkan program *Workshop: The fight against the proliferation of man-portable air defense system*, dan pada tahun 2006, 2007, 2008, Swiss menawarkan *Course on handling with nuclear, biological and chemical emergencies on Tactical Levels*. Kemudian melalui GSCP, Swiss banyak melakukan *events* terkait proliferasi senjata pemusnah massal, diantaranya adalah:

- a. Diskusi publik “*Security in a World without Nuclear Weapons*”, pada tanggal 28 Januari 2014;
- b. Diskusi publik “*Overcoming Pakistan’s Nuclear Dangers*”, pada tanggal 7 April 2014;
- c. Seminar publik “*The Middle East, Zone Free of Nuclear Weapons and Other Weapons of Mass Destruction: Prospects and Challenges*”, pada tanggal 25 Juni 2014;
- d. Seminar “*Confidence & Compliance with the Biological Weapons Convention*”, pada tanggal 3 Agustus 2014;
- e. Diskusi publik “*U.S Perspectives on Opportunities and Challenges of Nuclear Disarmament*”, pada tanggal 17 Desember – 6 May 2014;
- f. “*Promoting dialogue in advance of the 2015 NPT Review Conference*”, pada tanggal 11-12 Maret 2015;
- g. Diskusi publik “*Monitoring Commitments in Nuclear Disarmament and Non-Proliferation*”, pada tanggal 11 Maret 2015;

- h. Seminar akademik “*Biological Weapons Convention 40th Anniversary*”, pada tanggal 30 Maret 2015;
- i. Diskusi publik “*Cooperation and Assistance with Implementation of the Arms Trade Treaty (ATT)*”, pada tanggal 9 Juli 2015;
- j. Seminar “*The Implementation of the Biological Weapons Convention*”, pada tanggal 3 Agustus 2015;
- k. Diskusi panel “*Future Prospects for the Arms Trade Treaty: The Secretariat, Treaty Implementation and Beyond*”, pada tanggal 17 November 2015;
- l. Seminar “*Building a Civil Society Coalition to Strengthen The Biological Weapons Convention (BWC)*”, pada tanggal 11-12 Desember 2015;
- m. Diskusi publik “*Nuclear Weapons Modernization: Ultimate Insurance or Guarantee of Insecurity?*”, pada tanggal 2 Maret 2016;
- n. Diskusi publik “*After the Iran Nuclear Deal, What Next?*”, pada tanggal 28 April 2016.

Ketiga, bersama dengan GCSP yang telah disertifikasi sebagai “*PfP Training Center*” Swiss meluncurkan publikasi laporan terbaru yang berjudul “*Security in a World without Nuclear Weapons*”. Dimana dalam laporan tersebut terdapat beberapa perdebatan terkait tiga kondisi yang dianggap penting dalam dunia paska senjata nuklir, yaitu mekanisme yang

dibutuhkan untuk mengelola hubungan antara kekuatan-kekuatan utama sehingga dapat mencegah pecahnya perang di antara mereka; pembentukan lembaga-lembaga internasional yang kuat untuk mencegah pecahnya konflik secara umum dan khususnya di antara kekuatan-kekuatan utama; dan memastikan bahwa senjata konvensional dan lainnya dikelola sehingga tidak berkembang secara vertikal dan horizontal dan menciptakan dinamika yang mengarah pada ketidakstabilan strategis dan konflik berdaya besar.

Terkait dengan isu Proliferasi Pemusnah Massal dan sistem jarak jauh. Swiss secara tegas berkomitmen untuk menghilangkan senjata nuklir. Swiss menganggap bahwa selama masih ada senjata nuklir maka perdamaian akan sulit dicapai, karena negara-negara yang memiliki nuklir akan cenderung menggunakannya kembali.

C. Kerusakan Lingkungan

1. Permasalahan

Swiss telah terancam oleh bencana alam selama berabad-abad, seperti banjir, cuaca ekstrim, tanah longsor, badai dan longsor salju. Dalam kurun waktu 30 tahun terakhir, banjir menjadi bencana tertinggi yang sering terjadi di Swiss. Kemudian diikuti oleh tanah longsor, badai dan longsor salju. Berikut adalah peta bencana alam yang terjadi di Swiss dari tahun 1980-2006:

kerusakan sebaik mungkin dengan cara membangun bendungan guna mengatasi banjir atau struktur pendukung dalam menangani longsor. Lebih lanjut lagi pengaruh perubahan iklim membuat potensi bencana semakin meningkat. Perubahan iklim yang disertai dengan angin kencang dan hujan lebat khususnya dibagian selatan dari pegunungan Alpen. Meningkatnya banjir pada musim dingin dan selama musim pancaroba juga telah diprediksi. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh perubahan iklim dapat menjadi ancaman yang lebih besar terhadap Swiss, sehingga sangat penting bagi Swiss untuk menyiapkan diri melalui pelatihan *crisis management*.

Isu perubahan iklim di dunia internasional bukan merupakan isu domestik yang dapat diselesaikan oleh satu negara saja, melainkan perlu adanya kerjasama antar negara terutama negara yang saling berbatasan satu sama lain. Perubahan iklim disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perusakan lingkungan berupa deforestasi atau penggundulan hutan dan efek rumah kaca berupa karbondioksida (CO₂), gas metana dan nitrous oxide yang dihasilkan oleh aktivitas manusia melalui pembakaran bahan bakar fosil untuk pembangkit listrik, pembakaran dari sektor transportasi dan dari hewan, pertanian seperti sawah, serta dasar laut Arktik.²⁷ Jika ditelaah lebih lanjut, faktor-faktor ini tidak hanya berasal dari internal Swiss saja, melainkan adanya sumbangan emisi yang lebih tinggi dari negara-negara di sekitarnya, seperti Itali, Perancis, Jerman dan Austria. Hal

²⁷ "Causes of Climate Change", diakses dari <https://www.epa.gov/climate-change-science/causes-climate-change>, pada tanggal 27 November 2016.

ini dibuktikan dengan data yang menunjukkan bahwa di kawasan Eropa, Itali berada di urutan ke-10, Perancis di urutan ke-19, Jerman di urutan ke-28, dan Austria di urutan ke-32 dalam *Europe: Pollution Index by Country* pada tahun 2016.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa Swiss bukan merupakan negara penyumbang utama terhadap perubahan iklim yang terjadi di Eropa melainkan negara-negara yang berada di sekitarnya. Swiss dalam *Europe: Pollution Index by Country* pada tahun 2016 hanya berada di urutan ke-33. Sehingga untuk mengatasinya, Swiss perlu merangkul negara-negara tersebut untuk mengatasi permasalahan iklim yang menjadi ancaman regional Eropa dan dunia.

2. Solusi yang ditawarkan *Partnership For Peace* (PfP)

Terkait dengan kerusakan lingkungan, Swiss menyadari bahwa tindakan pencegahan dan cepat tanggap sangat diperlukan.²⁸ Dampak kerusakan lingkungan tidak memiliki batas-batas geografis dan mempengaruhi semua orang di seluruh dunia. Melalui kerjasama dengan PfP, Swiss gencar melakukan dialog, diskusi, dan pertukaran informasi. Berikut ini adalah beberapa *event* yang telah dan akan dilakukan:

- a. Konferensi “*Global Security Transformation: Present, Past and Future Challenges*”, pada tanggal 29-30 May 2015;

²⁸ “*Managing Climate and Natural Disaster Risk*”, diakses dari http://www.swissre.com/rethinking/climate_and_natural_disaster_risk/, pada tanggal 1 Oktober 2016.

- b. Diskusi dan pelatihan “*Climate Change: Security Challenges and Solutions*”, pada tanggal 24-28 Oktober 2016;
- c. Diskusi publik, “*Climate Change After Paris: Security and Sustainability in Practice*”, pada tanggal 9 Maret 2016;
- d. Pelatihan “*Crisis Management: Navigating The Storm*”, pada tanggal 13-17 Maret 2017.

Kemudian Swiss juga mendukung pengembangan PfP’s *Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre* (EADRCC) untuk operasi tanggap bencana di negara anggota NATO dan negara-negara mitra. EADRCC melakukan latihan bantuan secara teratur dan telah menjabat sebagai kerangka untuk menanggapi (dengan partisipasi Swiss) bencana alam.²⁹ Meskipun Swiss belum menggunakan organisasi tersebut, organisasi tersebut siap untuk membantu bencana banjir atau kebakaran hutan yang melebihi kemampuan nasional.

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa Swiss sebagai negara yang rasional memahami dan menyadari akan adanya isu-isu baru yang mengancam keamanan dan kedaulatan negaranya. Swiss juga menyadari bahwa sikap tertutup tidak akan membantu negaranya untuk terbebas dari isu-isu tersebut. Sehingga pada akhirnya Swiss memutuskan untuk mengubah kebijakan luar negerinya dengan cara melakukan kerjasama internasional dengan negara lain. Dengan

²⁹ Marc R. DeVore and Armin Stahli, *From Armed Neutrality to External Dependence: Swiss Security in the 21st Century*, *University of St. Gallen, Swiss Political Science Review* 17(1), hal. 17.

adanya kerjasama internasional, Swiss tidak harus menyelesaikan isu-isu tersebut sendiri, karena logikanya Swiss adalah negara yang dikelilingi oleh negara-negara Eropa lainnya, sehingga ancaman yang didapat pun akan sama.

Untuk itu, Swiss melakukan kerjasama dengan negara-negara Eropa lainnya melalui PfP, dimana PfP adalah program kerjasama dari NATO yang dapat diikuti oleh Swiss tanpa harus mengorbankan netralitasnya. PfP dijadikan wadah oleh Swiss untuk membicarakan, membahas, dan mengatasi ancaman isu-isu tersebut. Sejauh ini dengan kerjasama yang telah terjalin antara Swiss dan PfP, Swiss telah berhasil untuk mengatasi isu-isu tersebut karena Swiss juga dibantu oleh negara-negara Eropa lainnya yang tergabung dalam NATO dan PfP.